



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA

Jl. Mayjend. Sungkono No. 24 Purbalingga, Telp. 0281-891336 Fax. 0281-891416

LKjIP

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2022**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

Jl. Mayjend. Sungkono No. 24 Purbalingga, Telp. 0281-891336 Fax. 0281-891416

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas ridhoNYA segala tugas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga di tahun 2022 secara umum berjalan baik. Sebagai salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dengan ini kami susun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (LKjIP OPD) Tahun 2022. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik/Instansi kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga seluruh kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga dapat berjalan dengan baik termasuk dalam penyusunan laporan ini dan Kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP tahun 2022 ini masih banyak kekurangan.

Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan selanjutnya membantu meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga,

2022

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Purbalingga



JOHAN ARIFIN, S.Sos. M.Si
NIP. 19740520 199803 1 004

DAFTAR ISI

	halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Fungsi Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis (Renstra)	8
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2 Analisis Capaian Kinerja	15
3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya	40
BAB IV PENUTUP	
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas	45
4.2 Permasalahan Yang Dihadapi	45
4.3 Strategi Pemecahan Masalah	45
4.4 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, adalah setiap akhir tahun anggaran setiap OPD wajib menyusun Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, yang sudah berjalan sejak tahun 1998. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi yaitu terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Guna mencapai terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih baik dan benar, efektif, efisien, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban dalam pencapaian pelaksanaan program/ kegiatan/ kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran guna terwujudnya akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja.

Adapun tujuan penyusunan LKJIP adalah :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak pemberi mandat/ amanat;
2. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;

1.3 Gambaran Umum Organisasi

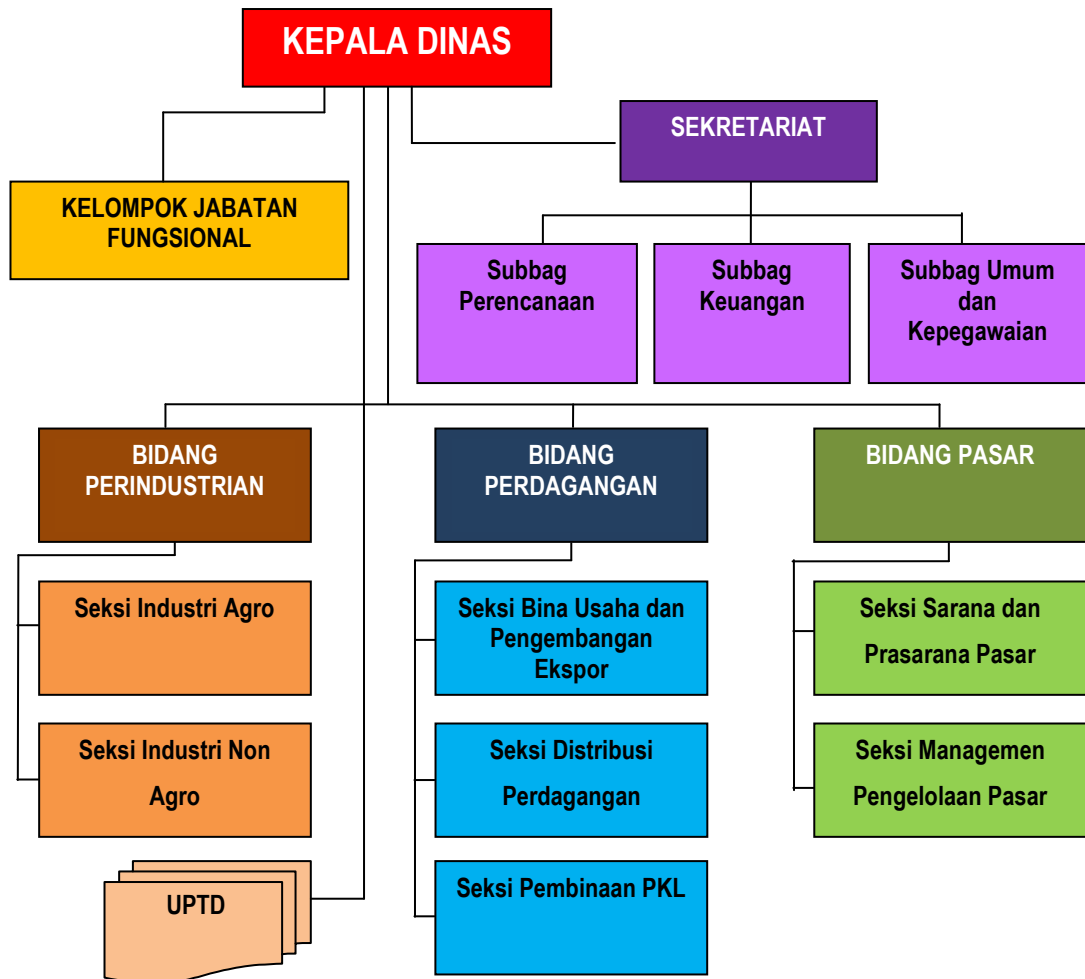
a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga yang beralamat di Jalan Mayor Jendral Sungkono No. 24 Kabupaten Purbalingga, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, terdiri dari :

1. Kepala Dinas : 1 orang
2. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sekretaris Dinas : 1 orang
 2. Subbagian Perencanaan; : 1 orang
 3. Subbagian Keuangan; : 1 orang
 4. Subbagian Umum dan Kepegawaian; : 1 orang
3. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Perindustrian : 1 orang
 2. Seksi Industri Agro : 1 orang
 3. Seksi Industri Non Agro : 1 orang
4. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Perdagangan : 1 orang

2. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Ekspor; : 1 orang
3. Seksi Distribusi Perdagangan; : 1 orang
4. Seksi Pembinaan Pedagang Kali Lima; : 1 orang
5. Bidang Pasar terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Pasar : 1 orang
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; : 1 orang
 3. Seksi Manajemen Pengelolaan Pasar; : 1 orang
6. Kelompok Jabatan Fungsional : 6 orang
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) : 5 UPTD



b. Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2022 seluruhnya sebanyak 201 orang, terdiri dari :

1. PNS = 64 Orang
 2. PTT = 137 Orang
- Jumlah = 201 Orang

**JUMLAH PTT
DILIHAT DARI URUTAN PENDIDIKANNYA**

NO	URAIAN	PENDIDIKAN					JML
		SD	SMP	SMA/K	D3	S1	
1	PTT	9	15	96	5	12	137

**JUMLAH PNS
DILIHAT DARI URUTAN PENDIDIKANNYA**

NO	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN										JML
		SD	SMP	SMA/K	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
1	Laki-Laki	5	4	19			3		15	5		51
2	Perempuan			3					9	1		13
	Jumlah	5	4	22			3		24	6		64

**JUMLAH PNS
DILIHAT DARI URUTAN KEPANGKATANNYA**

NO	JENIS KELAMIN	GOL I				GOL II				GOL III				GOL IV					JML
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e	
1	Laki-Laki				4		4	5	8	5	8		7	4	2				47
2	Perempuan						2	2	5		3	4	1						17
	Jumlah				4		4	7	10	10	8	3	11	5	2				64

Selengkapnya terlampir dalam DUK tahun 2022

c. Kondisi Sarana dan Prasarana

Untuk asset yang dikelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga saat ini menempati 2 (dua) buah gedung yang terletak di Jl. Mayjend Sungkono Purbalingga, dimana satu buah gedung yang ditempati Bidang Perdagangan status tanahnya adalah milik Pemerintah Daerah Purbalingga dan satu gedung yang ditempati Sekretariat dan Bidang Industri status tanahnya adalah masih milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk sarana operasional kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga mempunyai kendaraan roda empat sebanyak 10 buah kendaraan, terdiri dari :

- 4 buah kondisi baik
- 4 buah kondisi tidak layak
- 1 buah kondisi sangat tidak layak dan rusak

Sedangkan kendaraan roda dua sebanyak 31 buah, dan roda tiga sebanyak 1 buah.

1.4 Fungsi Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Di Bidang Perindustrian, Industri Kecil dan Menengah (IKM) mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purbalingga yang terus meningkat setiap tahunnya.

Kendati demikian, kondisi IKM tetap rawan karena keberpihakan bank yang rendah, pasar bebas yang mulai dibuka, serta terbatasnya kebijakan yang mendukung sektor usaha kecil. Untuk itu pengembangan IKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Program dan kebijakan pemerintah kedepan perlu diupayakan lebih kondusif

bagi tumbuh dan berkembangnya IKM, disamping itu mampu memecahkan permasalahan utama yang selama ini sering dihadapi IKM antara lain :

1. Penggunaan teknologi yang rendah
2. Kemampuan pemasaran terutama e-commerce dan pasar global yang terbatas;
3. Belum terjalin dengan baik kemitraan saling menguntungkan antar pelaku usaha (IKM, Usaha Besar dan BUMN);
4. Kelembagaan yang belum tertata dengan baik;

Sedangkan di Bidang Perdagangan permasalahan utama antara lain:

1. Kurang optimalnya ketepatan sasaran distribusi barang bersubsidi (pupuk dan LPG 3kg);
2. Masih terdapat pasar rakyat yang belum optimal kualitas sarana prasarana dan manajemen pengelolaannya;
3. Masih rendahnya kesadaran konsumen untuk menjadi konsumen cerdas;
4. Belum optimalnya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum Organisasi
- 1.4 Fungsi Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis (Renstra)
- 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

- 3.2 Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas
- 4.2 Permasalahan Yang Dihadapi
- 4.3 Strategi Pemecahan Masalah
- 4.4 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra)

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi Dinas merupakan penjabaran dari Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 adalah :

“PURALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA“.

2. Misi

Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan implementasi dari misi kabupaten yang ke – 5 yaitu :

- Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja ”.

Dengan memperhatikan visi dan misi kabupaten tersebut, tersusunlah visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

"Terwujudnya Industri dan Perdagangan yang mandiri berdaya saing, berwawasan lingkungan dan pengembangan potensi daerah".

Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Industri dan perdagangan yang mandiri dan berdaya saing

Terwujudnya Industri dan Perdagangan yang mampu memenuhi kebutuhan lokal, regional, nasional dan internasional serta memenuhi standar mutu baik nasional maupun internasional.

2. Berwawasan lingkungan

Industri dan Perdagangan yang dikembangkan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

3. Pengembangan potensi daerah

Pengembangan Industri dan Perdagangan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Melihat dari visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan implementasi dari misi Kabupaten Purbalingga yang ke – 5 kemudian dijabarkan menjadi misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu :

1. Meningkatkan peran sektor industri dan perdagangan sebagai penggerak perekonomian daerah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan fasilitasi pengembangan industri dan perdagangan berbasis potensi dan sumber daya lokal;
3. Mewujudkan sistem informasi di bidang Industri dan Perdagangan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing;
4. Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan dan sarana prasarana di bidang perindustrian dan perdagangan;
5. Meningkatkan sistem pengawasan perindustrian dan perdagangan serta perlindungan konsumen;

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi Misi dan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 sampai 5 tahun kedepan.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan, maka perlu adanya perumusan kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur, serta sarana dan prasarana kerja;
2. Meningkatkan fasilitasi peningkatkan sumber daya manusia, kelembagaan, sarana prasarana dan tehnologi di bidang industri dan perdagangan;
3. Penumbuhan wirausaha baru di bidang industri dan perdagangan;
4. Fasilitasi standarisasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) produk industri;
5. Fasilitasi peningkatan daya saing dan produk industri;
6. Fasilitasi pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
7. Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat, barang penting, barang strategis, barang bersubsidi serta barang perdagangan lainnya yang peredarannya perlu diawasi;
8. Pembinaan usaha dan kelembagaan perdagangan;
9. Penyediaan data dan informasi di bidang industri dan perdagangan;
10. Mengembangkan kemitraan di bidang industri dan perdagangan.

C. Program Pembangunan dan Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Dengan kebijakan tersebut dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka program yang dikembangkan dalam rangka pelaksanaan bidang perindustrian dan perdagangan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
5. Program Pengembangan Ekspor
6. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

7. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian dan Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Purbalingga untuk mewujudkan target kinerja pada Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Sesuai format PK

No.	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian	1.1. Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB)	Persen Rupiah (Juta)	4,5 7.520.557
2	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	1.1. Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan 1.2. Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPERINDAG	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB) Nilai SAKIP DINPERINDAG	Persen Rupiah (Juta) Indeks	4 3.335.863 67,97

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$92\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian Kinerja didapatkan dengan membandingkan antara Realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan

Perdagangan dengan Bupati Purbalingga. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Target}) \times 100 \%$$

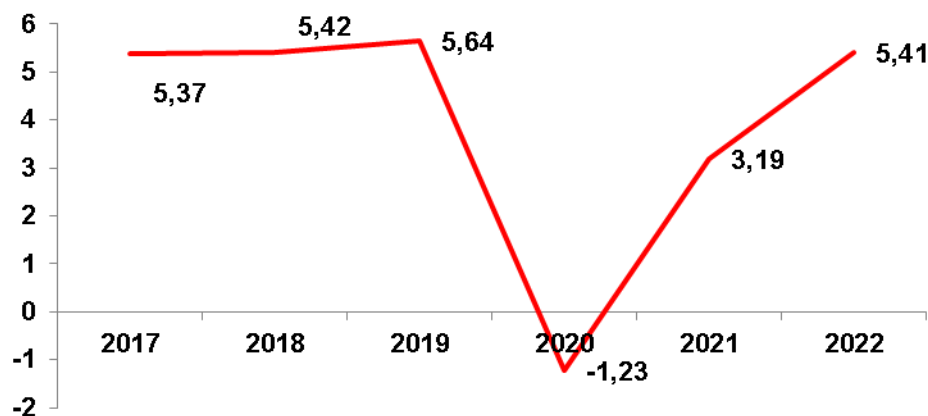
Pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

No.	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian	1.2. Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB)	Persen Rupiah (Juta)	4,5 7.520.557	3,76 8.018.180
2	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	1.3. Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan 1.4. Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPERINDAG	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB) Nilai SAKIP DINPERINDAG	Persen Rupiah (Juta) Indeks	4 3.335.863 67,97	3,91 3.620.500 72,41

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebesar 5,41% atau naik sebesar 2,22% dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu sebesar 3,19%. Jika dibanding Tahun 2020 (-1,23%) Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sudah mengalami kenaikan cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari Pandemi COVID-19 sudah mulai berkurang dan pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga



Dalam rangka pencapaian tujuan sektor perindustrian yaitu meningkatnya kinerja sektor perindustrian dengan indikator tujuan tersebut adalah tercapainya Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, dengan sasaran Peningkatan Daya saing sektor perindustrian sehingga tercapai Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB) atas dasar harga berlaku. Sedangkan tujuan sektor perdagangan adalah Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dengan indikator tercapainya Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan sehingga mencapai sasaran Peningkatan daya saing sektor perdagangan dan Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPERINDAG sehingga meningkatnya Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB) dan Nilai SAKIP DINPERINDAG.

Untuk tercapainya meningkatkan kinerja sektor perindustrian dan sektor perdagangan maka diperlukanya peningkatan daya saing sektor perindustrian dan sektor perdagangan. Daya saing merupakan suatu upaya yang harus dilakukan oleh pelaku usaha/ekonomi agar tetap eksis dalam menjalankan kegiatannya. Istilah ini mudah diungkapkan dan menjadi program andalan dari pemerintah, akan tetapi istilah ini menjadi persoalan besar bagi pelaku ekonomi, khususnya para pelaku UMKM. Mereka menganggap bahwa daya saing memerlukan “perubahan mendasar dan strategi khusus”. Daya saing mensyaratkan level sumber daya manusia berkualitas, teknologi maju, modal yang cukup, serta lingkungan yang kondusif.

Dalam mencapai tujuan meningkatkan kinerja sektor perindustrian dan sektor perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga telah melakukan berbagai macam strategi dan cara dalam meningkatkan daya saing baik dalam urusan perindustrian maupun perdagangan.

1. Urusan Perindustrian

a. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di tahun 2022 mencapai 3,76%, dibandingkan dengan PDRB tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,04% dari 3,80%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih belum stabil dari dampak pandemi Virus Corona (Covid-19) yang sebelumnya memporak porandakan perekonomian walau sekarang dampaknya sudah mulai menurun. Akibat dari dampak pandemi Virus Corona (Covid-19) banyak sekali perubahan dalam struktur ekonomi terutama di bidang usaha salah satunya adalah akibat dilarangnya interaksi jual beli secara langsung sehingga mengakibatkan perubahan dalam pelayanan ke konsumen yang sebelumnya tradisional secara langsung sekarang dengan tidak langsung (digital/ E-Commerce). Akibat adanya era digital sektor industri mengalami

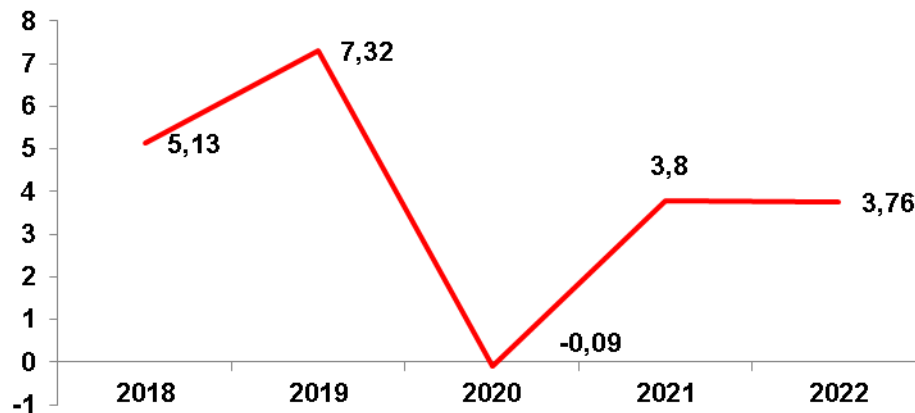
perubahan pesat, salah satu dampak baiknya yaitu munculnya industri-industri baru yang terus tumbuh, sedangkan dampak buruknya sektor industri yang sudah berjalan yang tidak dapat mengikuti di era digital ini juga banyak yang mengalami kejatuhan, banyak industri kecil yang mengalami gulung tikar akibat tidak dapat mengikuti perubahan zaman.

Tujuan

Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2021
Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	-0,09	3,80	4,5	3,76	83,56
Nilai Realisasi Kinerja							Tinggi

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan



b. Sasaran : Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian

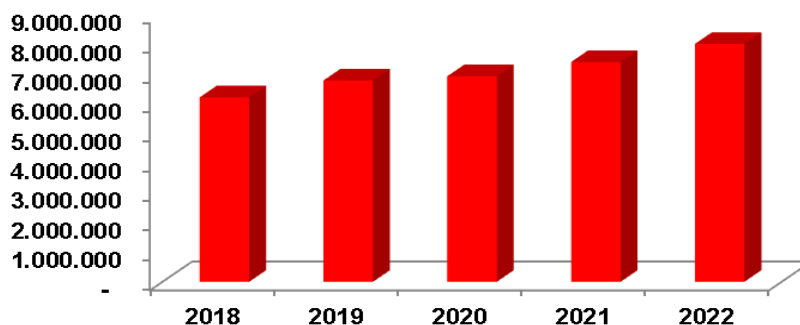
Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian guna mewujudkan tujuan strategis yaitu Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian maka salah satu indikatornya yaitu meningkatnya Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB).

Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB) tahun 2022 sebesar Rp. 8.018,180 juta rupiah, dibanding tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 609.230 juta rupiah dari Rp. 7.408.950 juta rupiah.

**Sasaran
Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB)	Juta rupiah	6.928.780	7.408.950	7.520.557	8.018.180	106,62
Nilai Realisasi Kinerja						Sangat Tinggi

Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan/ADHB (juta rupiah)



Salah satu tolak ukur daya saing IKM adalah adanya jaminan kualitas produksi, legalitas usaha, serta kompetensi sumber daya manusia pelaku IKM. Meningkatkan jaminan kualitas produksi IKM dilakukan melalui cara pemberian bantuan peralatan produksi dan penerbitan sertifikasi IKM antara lain :

1. Sertifikat Jaminan Halal
2. Sertifikat Hak Merk
3. Sertifikat GMP
4. Sertifikat Profesi Keahlian Batik
5. Sertifikat Profesi Keahlian Las/SKKNi Welder
6. Sertifikasi HACCP
7. Sertifikasi ISO 22000

Untuk legalitas usaha yaitu kemudahan dalam perizinan sedangkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku IKM dilakukan melalui pelatihan-pelatihan seperti pelatihan desain batik, makanan olahan, kerajinan dan sebagainya.

Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara rencana dan realisasi kinerja untuk Sasaran 1 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Persentase
Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian	PDRB Sub Sektor Industri	28,12	TW I	7,03	6,01	85,49%
			TW II	14,06	14,2	101,00%
			TW III	21,09	21,08	99,95%
			TW IV	60	60	100%

Upaya pencapaian target kinerja per triwulan dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan baik dengan OPD terkait maupun stakeholders lainnya. Selain itu secara berkala juga dilakukan kegiatan evaluasi triwulanan untuk mendapatkan bahan masukan peningkatan kinerja kegiatan pada triwulan berikutnya.

Pada triwulan pertama, pencapaian target kegiatan masih relative rendah dikarenakan adanya proses persiapan – persiapan administrasi serta koordinasi. Kegiatan mulai berjalan efektif mulai triwulan kedua sampai dengan triwulan keempat.

Secara umum pencapaian target indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 didukung oleh terealisasinya kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja di atas, antara lain :

- a. FGD (Forum Grup Diskusi) Upaya Peningkatan Kualitas Knalpot Purbalingga;
- b. Uji Kompetensi SDM Batik;
- c. Bantuan Bahan Baku Produksi untuk IKM Pangan Olahan;
- d. Pelatihan GMP (Good Manufacturing Practices);
- e. Pelatihan Desain Pola Batik Bagi IKM Batik;
- f. Bantuan Mesin dan Alat;
- g. Pelatihan Perakitan Motor Listrik Purbalingga;
- h. Pengawasan Perijinan Berusaha;

Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian pada urusan perindustrian, adalah sebesar Rp 852.048.348,00 atau 94,77% dari total pagu sebesar Rp. 899.060.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan keuangan sebesar 5,23 % dari pagu yang ada.

Keberhasilan pencapaian ini sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan 3 program, 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu :

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
 - 1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - 1.1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

- 1.2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- 1.3) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
 - 1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1.1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - 1) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1.1) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)



Foto Kegiatan

FGD (Forum Grup Diskusi) Upaya Peningkatan Kualitas Knalpot Purbalingga



Foto Kegiatan
Uji Kompetensi SDM Batik



Foto Kegiatan
Pelatihan Desain Pola Batik Bagi IKM Batik



Foto Kegiatan
Bantuan Bahan Baku Produksi untuk IKM Pangan Olahan



Foto Kegiatan
Bantuan Mesin dan Alat



Foto Kegiatan
Pelatihan GMP (Good Manufacturing Practices)



Foto Kegiatan
Pelatihan Perakitan Motor Listrik Purbalingga

2. Urusan Perdagangan

a. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

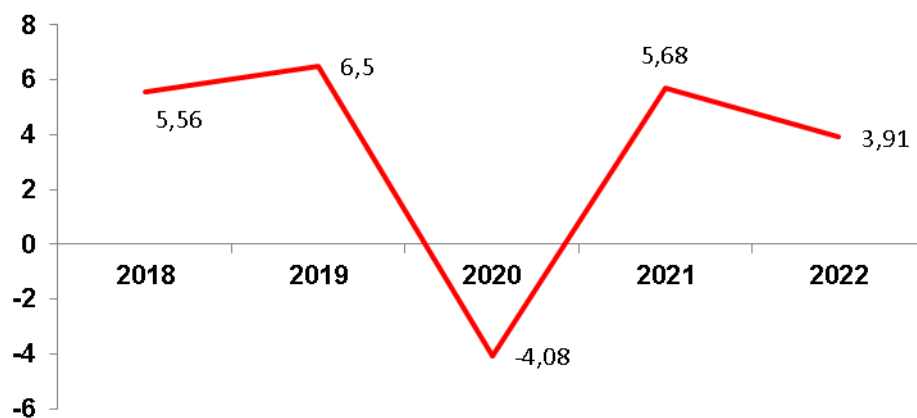
Tujuan

Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	-4,08	5,68	4	3,91	97,75
Nilai Realisasi Kinerja							Sangat Tinggi

Realisasi PDRB sektor perdagangan tahun 2022 sebesar 3,91% atau hanya mencapai 97,75% dari target yang direncanakan 4%. Kalau dibandingkan dengan tahun 2021 nilai PDRB sektor perdagangan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,77% dari 5,68%. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian daerah di sektor perdagangan juga masih belum stabil dari dampak pandemi Virus Corona (COVID-19).

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan



Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja PDRB sub sektor perdagangan selama tahun 2022 antara lain:

1. Pembinaan dan pengawasan pada distributor-distributor LPG, pupuk, SPBU, distributor KEPOKMAS dan barang penting/strategis lainnya;
2. Pembinaan dan pengawasan distribusi barang KEPOKMAS, barang penting dan strategis lainnya;
3. Pembinaan dan pengawasan toko swalayan;
4. Revitalisasi pasar rakyat.

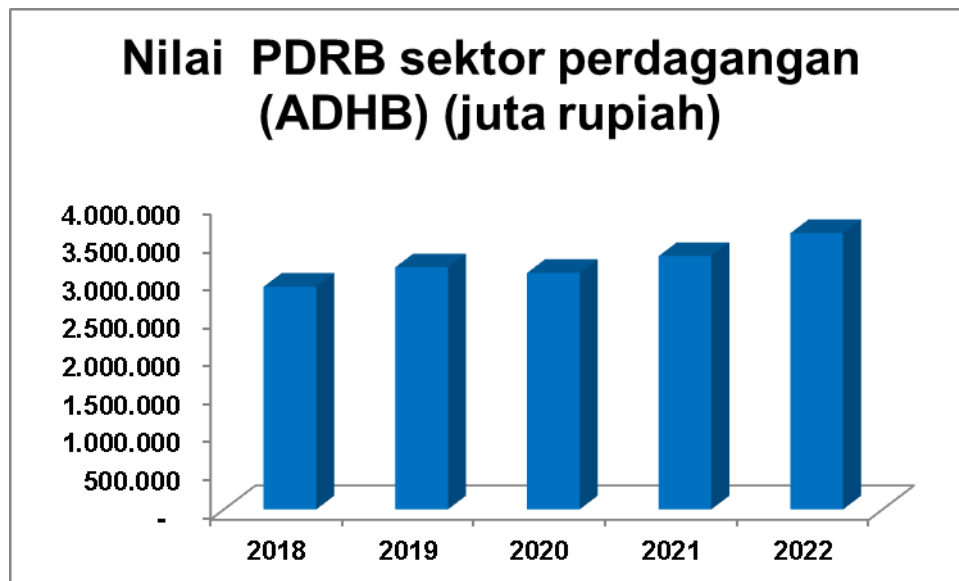
b. Sasaran 1 : Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan

Dalam rangka pencapaian sasaran Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan guna mewujudkan tujuan strategis yaitu Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan tahun 2022 indikatornya yaitu meningkatnya Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB).

**Sasaran 1 Indikator 1
Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB)	Juta rupiah	3.099.090	3.320.850	3.335.863	3.620.500	108,53
Nilai Realisasi Kinerja							Sangat Tinggi

Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB) tahun 2022 sebesar Rp. 3.620.500 juta rupiah, dibanding tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 299.650 juta rupiah dari Rp. 3.320.850 juta rupiah.



Dalam upaya meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan di tahun 2022 antara lain melalui :

1. Peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan yaitu melalui Rehabilitasi/Pembangunan Pasar Rakyat dan Program Dandan Warung;
2. Peningkatan nilai ekspor melalui pelatihan SDM di bidang ekspor impor;
3. Pengawasan Barang Kepokmas, Barang Penting dan Strategis seperti beras, minyak, kedelai dan lain-lain;
4. Pengawasan Barang Bersubsidi seperti elpiji dan pupuk;

Peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan salah satunya adalah pembangunan dan rehabilitasi pasar tradisional/rakyat. Jumlah pasar yang ada di Kabupaten Purbalingga ada 51 pasar, sebanyak 21 pasar adalah pasar milik pemerintah daerah dan 30 pasar milik desa. Dari total 51 pasar di Kabupaten Purbalingga banyak pasar yang sudah dapat dianggap tidak layak untuk transaksi perdagangan, dikarenakan kondisi sarana dan prasarannya sudah tidak baik.

Tahun 2021 ada 14 kegiatan rehabilitasi guna mewujudkan pasar layak usaha adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Pasar Panican
2. Pembuatan Pintu Besi Pasar Rakyat Kertanegara
3. Perbaikan MCK Pasar Rakyat Karanganyar
4. Perbaikan Saluran Drainase Pasar Segamas
5. Pembangunan Kios Cabut Bulu Pasar Segamas
6. Penataan Lingkungan Pasar Rakyat Bobotsari
7. Penataan Lingkungan Pasar Rakyat Bukateja
8. Penataan Lingkungan Pasar Rakyat Kutawis
9. Pembangunan Pagar Keliling Pasar Rakyat Tobong
10. Penataan Halaman Pasar Rakyat Tobong
11. Pembangunan Kawasan PFC Tahap 3
12. Pembangunan Lapak Kopi PFC Barat
13. Pematangan Lahan Revitalisasi Pasar Badog Bancar
14. Penataan Lingkungan Curgecang Kuliner Center (CKC)

Tahun 2022 ada 2 kegiatan rehabilitasi guna mewujudkan pasar layak usaha adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Pasar Rakyat Badog Bancar;
2. Pembangunan Purbalingga Food Center (PFC) Tahap 4;

Dalam rangka menjaga eksistensi pasar rakyat ditengah pertumbuhan toko swalayan maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan berbagai upaya peningkatan daya saing pasar rakyat salah satunya melalui kegiatan revitalisasi pasar rakyat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga berupaya meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan pasar dan daya saing pengelola pasar melalui kegiatan bimbingan teknis pengelolaan pasar dan study banding pengelolaan pasar.

Kedepan, disamping meningkatkan pengawasan dan pembinaan kebersihan pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga akan mengaplikasikan program e-Retribusi guna meningkatkan

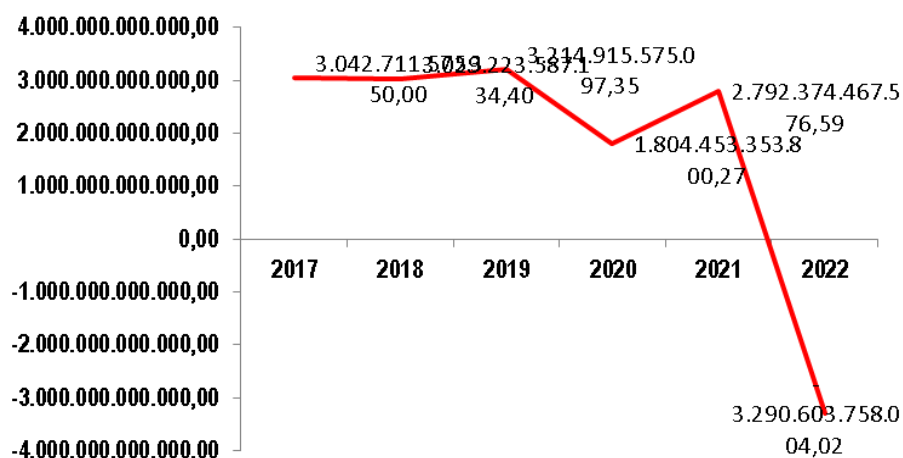
pelayanan retribusi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor layanan pasar

Selain melalui revitalisasi pasar, dalam rangka mewujudkan pasar sehat dan bersih dan pasar rakyat layak usaha, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga telah meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait khususnya Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan intensitas pengambilan sampah di TPS Pasar. Selain itu, juga menambah container sampah serta meningkatkan intensitas pembinaan terhadap para petugas kebersihan pasar agar lebih disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Guna mewujudkan pasar sehat, bekerjasama dengan BPOM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, secara berkala juga melakukan pengawasan peredaran makanan/ minuman yang mengandung bahan berbahaya.

Nilai ekspor Kabupaten Purbalingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. -3.290.603.758.004,02, ini berarti bahwa antara ekspor barang dengan impor barang lebih banyak impor barang. Ekspor tahun 2022 sebesar Rp. 6.686.827.571.185,56 sedang impor barang sebesar Rp. 9.977.431.329.189,58.

NILAI EKSPOR KABUPATEN PURBALINGGA



Adapun perusahaan penyumbang nilai ekspor Kabupaten Purbalingga tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PERUSAHAAN	EKSPOR	IMPOR	NILAI EKSPOR
1	PT. ROYAL KORINDAH	137.757.084.608,00	10.150.622.884,00	127.606.461.724,00
2	PT. HYUP SUNG INDONESIA	2.242.950.519.500,00	840.188.007.145,30	1.402.762.512.354,70
3	PT. INDOKORES SAHABAT	394.281.415.557,45	8.054.227.844.408,59	7.659.946.428.851,14
4	PT. YURO MUSTIKA	77.586.005.905,00	11.973.926.871,00	65.612.079.034,00
5	PT. SUNG CHANG INDONESIA	945.284.010.016,72	225.883.745.655,86	719.400.264.360,86
6	PT. KESAN BARU SEJAHTERA	28.264.225.620,00	5.616.093.900,00	22.648.131.720,00
7	PT. HASTA PUSAKA SENTOSA (WIG)	18.295.614.406,80	0	18.295.614.406,80
8	PT. SUNG SHIM INTERNASIONAL	137.803.499.923,19	3.397.526.018,92	134.405.973.904,27
9	PT. HANMI HAIR INDONESIA	51.882.549.933,98	7.546.288.365,20	44.336.261.568,78
10	PT. BOYANG INDUSTRIAL	692.520.876.192,05	149.438.774.058,13	543.082.102.133,92
11	PT. INTERWORK INDONESIA	30.156.178.216,68	608.910.985.865,67	-578.754.807.648,99
12	PT. MILAN INDONESIA	952.334.037.238,11	7.576.117.065,46	944.757.920.172,65
13	PT. WON JIN INDONESIA	12.650.871.023,00	1.846.359.144,00	10.804.511.879,00
14	PT. SOPHIAN INDONESIA	13.448.528.727,10	769.122.288,35	12.679.406.438,75
15	PT. INTERCOSTEK INDONESIA	TUTUP	TUTUP	TUTUP
16	PT. JHON TOYS INDONESIA (BONEKA)	129.813.876.130,00	31.027.556.760,00	98.786.319.370,00
17	PT. MAHKOTA ESTETIKA ABADI	2.669.283.227,00	0	2.669.283.227,00
18	PT. TIGA PUTRA ABADI PERKASA	29.478.268.348,00	0	29.478.268.348,00
19	PT. SUNSTARINDO WIRAHUSADA	27.504.076.260,67	69.648.250,00	27.434.428.010,67
20	PT. SHINHAN CREATINDO	8.531.625.979,00	0	8.531.625.979,00
21	PT. BINTANG MAS TRIYASA	124.819.118.919,26	4.699.068.623,00	120.120.050.296,26
22	PT. SINAR CENDANA ABADI	74.397.106.051,00	5.647.791.728,10	68.749.314.322,90
23	PT. MAHTOKA TRI ANGJAYA (BULU MATA)	59.399.874.193,00	7.849.997.863,00	51.549.876.330,00
24	PT. ROSA SEJAHTERA EYELASHES	21.321.285.934,52	467.698.445,00	20.853.587.489,52
25	PT. BIMA NUGRAHA	30.166.745.840,52	144.153.850,00	30.022.591.990,52
26	PT. KARYA BHAKTI MANUNGGAL	16.753.275.532,00	0	16.753.275.532,00
27	PT. MAJAPURA	56.961.782.482,60	0	56.961.782.482,60
28	CV. PURBAYASA	266.481.659.577,35	0	266.481.659.577,35
29	CV. SN JAYA PRIMA	21.277.036.878,00	0	21.277.036.878,00
30	CV. PHOENIX AGUNG PRIMA (KAYU LAPIS)	81.296.304.164,56	0	81.296.304.164,56
31	CV. RAYUNG PELANGI	740.834.800,00	0	740.834.800,00
JUMLAH		6.686.827.571.185,56	9.977.431.329.189,58	3.290.603.758.004,02

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa sebagian besar nilai ekspor Kabupaten Purbalingga masih sangat mengandalkan perusahaan-perusahaan penanaman modal asing (PMA) dengan produk unggulan rambut palsu dan bulu mata palsu. Hanya sebagian kecil perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang sudah eksis menyumbang nilai ekspor.

Oleh karena itu kedepan perlu diupayakan agar perusahaan dan industri kecil menengah Kabupaten Purbalingga yang memiliki potensial ekspor untuk terus dapat dilakukan pembinaan serta fasilitasi sehingga mereka mampu ekspor sekaligus sebagai upaya diversifikasi produk ekspor Kabupaten.

Dalam upaya pencapaian target ekspor di Kabupaten Purbalingga setiap tahun Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan nilai ekspor yaitu berupa pelatihan manajemen dan prosedur ekspor yang secara rutin diselenggarakan melalui kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Balai Pengembangan Pelatihan Ekspor Indonesia Kementerian Perdagangan RI. Kegiatan tersebut melibatkan peserta sebanyak 40 orang perwakilan perusahaan potensial ekspor

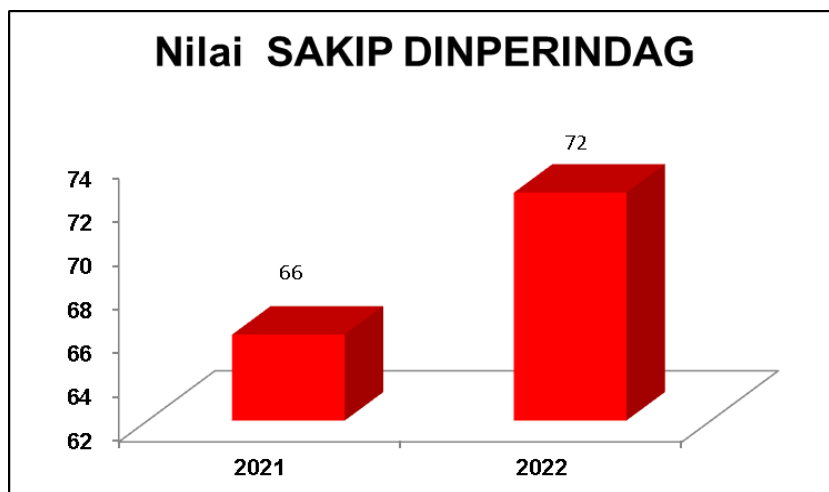
Kegiatan monitoring perkembangan ekspor di setiap perusahaan eksportir secara berkala juga terus dilakukan untuk memantau perkembangan nilai ekspor serta mengetahui secara dini kemungkinan adanya kendala/ hambatan yang ditemui eksportir.

Upaya lain untuk meningkatkan nilai ekspor di Kabupaten Purbalingga juga dilakukan melalui fasilitasi perijinan ekspor sesuai ketentuan berlaku, aktif mengikuti kegiatan promosi/pameran/misi dagang baik dalam skala regional, nasional maupun internasional serta turut mendukung terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif di Kabupaten Purbalingga.

c. Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPERINDAG

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPERINDAG guna mewujudkan tujuan strategis yaitu Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan, yaitu

1. Peningkatan kualitas SDM Dinperindag melalui diklat dan pelatihan;
2. Peningkatan tertib administrasi kegiatan melalui pengawasan/monitoring dan evaluasi kegiatan;



Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1 dan 2 (urusan perdagangan) adalah sebesar Rp.13.925.659.103,00 atau 97,66% dari total pagu sebesar Rp.14.259.825.500,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan keuangan sebesar 2,34% dari pagu yang ada.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 dan 2 tidak terlepas dari pelaksanaan 5 program, 15 kegiatan dan 27 sub kegiatan, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - 4.1) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5.3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5.4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5.5) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 6.2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 7.2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7.3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
 - 1) Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - 1.1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 2) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - 2.1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- c. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 1) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 1.1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 1.2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

- 2) Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - 2.1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- d. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - 1) Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1.1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - 1.2) Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - 2) Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - 2.1) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - 3) Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1) Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
- e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - 1.1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang



Foto Kegiatan
Pembangunan Pasar Rakyat Badog Bancar



Foto Kegiatan
Program Dandan Warung



Foto Kegiatan Pasar Murah



Foto Kegiatan
Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga



Foto Kegiatan
Sosialisasi Kenaikan BBM di OR Purbalingga



Foto Kegiatan
Monitoring Harga Kebutuhan Pokok



Foto Kegiatan
Monitoring Pupuk



Foto Kegiatan
UTTP Metrologi Legal

3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Urusan Perindustrian

Tabel 1 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosen (%)
Misi ke - 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja				
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian 				
PDRB Sub Sektor Industri dan Nilai PDRB sektor industri Pengolahan (ADHB)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	877.000.000	834.684.348	95,17
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	13.520.000	10.470.000	77,44
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	8.540.000	6.894.000	80,73

Untuk mencapai tujuan Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dengan sasaran Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian, sebagai indikatornya adalah PDRB Sub Sektor Industri dan Nilai PDRB sektor industri diperlukan anggaran total sebesar Rp. 899.060.000 yaitu melalui tiga program, Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 877.000.000, terserap sebesar Rp.834.684.348 atau sebesar 95,17%, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.520.000, terserap sebesar Rp. 10.470.000 atau sebesar 77,44%, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.540.000, terserap sebesar Rp. 6.894.000 atau sebesar 80,73%..

Tabel 2 Analisis Efisiensi

Tujuan / Sasaran / Indikator	Indikator	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosen (%)	% Capaian Kinerja	Ket
Misi ke - 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja						
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian 						
PDRB Sub Sektor Industri dan Nilai PDRB sektor industri Pengolahan (ADHB)		877.000.000	834.684.348	95,17	83,56	Baik
		13.520.000	10.470.000	77,44		
		8.540.000	6.894.000	80,73	106,62	Sangat Baik

Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional digunakan untuk mendukung dua indikator yaitu PDRB Sub Sektor Industri dan Nilai PDRB sektor industri Pengolahan (ADHB) dengan anggaran terserap sebesar 94,77%, dengan capaian kinerja sebesar 83,56% (baik/tinggi) untuk indikator PDRB Sub Sektor Perindustrian dan 106,62% (sangat baik/sangat tinggi) untuk indikator Nilai PDRB sektor industri Pengolahan (ADHB).

b. Urusan Perdagangan

Realisasi Anggaran Tahun 2021

Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosen (%)
Misi ke - 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja				
Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan ▪ Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPERINDAG 				
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Dan Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB)	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	27.087.000	26.912.000	99,35
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.538.497.000	5.461.605.600	98,61
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	380.512.500	379.637.090	99,77
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	317.624.000	316.653.856	99,69
Nilai SAKIP DINPERINDAG	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.996.105.000	7.740.850.557	96,81

Guna mencapai tujuan Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan dibidang urusan perdagangan dengan sasaran Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPERINDAG, diperlukan anggaran total sebesar Rp.14.259.825.500 yaitu melalui lima program :

- Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.087.000, terserap sebesar Rp. 26.912.000 atau sebesar 99,35%;

- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.538.497.000, terserap sebesar Rp. 5.461.605.600 atau sebesar 98,61%,
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan pagu anggaran sebesar Rp. 380.512.500, terserap sebesar Rp. 379.637.090 atau sebesar 99,77%,
- Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 317.624.000, terserap sebesar Rp. 316.653.856 atau sebesar 99,69%,
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.996.105.000, terserap sebesar Rp. 7.740.850.557 atau sebesar 96,81%,

Tabel Analisis Efisiensi

Tujuan / Sasaran / Indikator	Indikator	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosen (%)	% Capaian Kinerja	Ket
Misi ke - 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja						
Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan ▪ Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPERINDAG 						
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Dan Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB)		27.087.000	26.912.000	99,35	97,75	Baik
		5.538.497.000	5.461.605.600	98,61		
		380.512.500	379.637.090	99,77	108,53	Sangat Baik
		317.624.000	316.653.856	99,69		
Nilai SAKIP DINPERINDAG		7.996.105.000	7.740.850.557	96,81	106,53	Sangat Baik

Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dan Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen digunakan untuk mendukung dua indikator yaitu Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Dan Nilai

PDRB sektor perdagangan (ADHB) dengan anggaran terserap sebesar 98,74%, dengan capaian kinerja sebesar 97,75% (baik/tinggi) untuk indikator PDRB Sub Sektor Pedagangan dan 108,53% (sangat baik/sangat tinggi) untuk indikator Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB).

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota digunakan untuk mendukung indikator Nilai SAKIP DINPERINDAG dengan anggaran terserap sebesar 96,81%, dengan capaian kinerja sebesar 106,53% (sangat baik/sangat tinggi).

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas

LKJIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2022, disusun mengacu pada Rencana Strategis Dinas tahun 2021 – 2026. Sesuai dengan salah satu tujuannya, maka laporan ini merupakan evaluasi dari tujuan, sasaran, kebijakan dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 berjalan dengan baik.

4.2 Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Pembangunan Pasar Tradisional Badog Bancar**

Kegiatan ini merupakan pekerjaan fisik untuk Pembangunan Pasar Tradisional Badog Bancar yang dibiayai dengan dana Tugas Pembantuan APBN Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dengan anggaran yang tersedia juga masih belum dapat menyelesaikan Pembangunan Pasar Tradisional Badog Bancar.

4.3 Strategi Pemecahan Masalah

1. Untuk kegiatan yang menjadi masalah utama karena kekurangan dana, maka penyelesaian pekerjaan dilanjutkan pada anggaran tahun 2023, melalui dana APBN maupun APBD;

4.4 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga di masa mendatang, antara lain :

1. **Terkait Pencapaian Sasaran 1 Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian**

- a. Memfasilitasi IKM dalam hal sarana dan prasarana yaitu melalui bantuan peralatan produksi sehingga meningkatkan kualitas produk;
 - b. Meningkatkan kualitas SDM IKM melalui pelatihan produksi, pelatihan manajemen perusahaan, magang di perusahaan sejenis;
 - c. Memfasilitasi IKM dalam mempromosikan produknya melalui pameran lokal, regional, nasional maupun internasional;
 - d. Meningkatkan nilai jual produk melalui fasilitasi sertifikasi produk seperti sertifikasi PIRT, halal, paten, dan BPOM;
2. Terkait Pencapaian Sasaran 2 Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan
- a. Meningkatkan SDM pengelola pasar melalui pelatihan manajemen pengelolaan pasar;
 - b. Pelaksanaan pembinaan para pedagang pasar secara berkala;
 - c. Melaksanakan revitalisasi pasar melalui dana APBD, provinsi maupun pusat (TP);
3. Terkait Pencapaian Sasaran 3 Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPERINDAG
- a. Meningkatkan kualitas SDM DINPERINDAG melalui pelatihan-pelatihan maupun diklat;
 - b. Meningkatkan kualitas sarana prasarana DINPERINDAG untuk meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian dan perdagangan.